

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian ini akan membahas mengenai kerangka penelitian, metode pengumpulan data dan analisa yang akan digunakan untuk merumuskan strategi manajemen perubahan dalam implementasi TIK di BPN RI

3.1 TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yang mengadopsi *soft system methodology* yang telah dibahas pada subbab 2.3.3. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 3.1. Tahapan-tahapan tersebut adalah

1. Merumuskan masalah

Pada tahapan yang pertama ini dilakukan pendefinisian permasalahan dan merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*).

2. Studi Literatur

Tahapan kedua ini merupakan tahapan mempelajari literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pembelajaran materi dari referensi yang terkait dengan bidang yang diperlukan dalam penelitian.

3. Pengambilan data

Pada tahapan ini dilakukan aktifitas-aktifitas berikut ini :

- Mengumpulkan data dan informasi

Pada tahap ini dikumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara dan observasi/pengamatan untuk mendapatkan data primer.

- Review dokumen

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian. Dokumen meliputi Renstra BPN RI, SOPP BPN RI, Peraturan Kepala BPN RI No 3/2006, Grand Desain TIK BPN RI dan Buku LOC IIB

4. Analisis dan interpretasi

Analisis dan interpretasi dilakukan terhadap data yang telah diperoleh. Analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan strategi manajemen perubahan TIK.

5. Merumuskan draft strategi manajemen perubahan

Perumusan strategi manajemen perubahan dilakukan pada tahapan ini dengan memetakan strategi manajemen perubahan dari analisis SWOT ke dalam kerangka manajemen perubahan dengan pendekatan *system thinking* (Haines, 2005). Strategi dirumuskan sesuai dengan kebutuhan BPN RI dalam melakukan manajemen perubahan. Untuk menentukan strategi manajemen perubahan digunakan metodologi *soft system* (Checkland, 2000). Pada tahap ini dilakukan konfirmasi terhadap *expert* (ahli) dengan

melakukan wawancara dan diskusi untuk mendapatkan konsensus dari strategi manajemen perubahan.

6. Menentukan skala prioritas

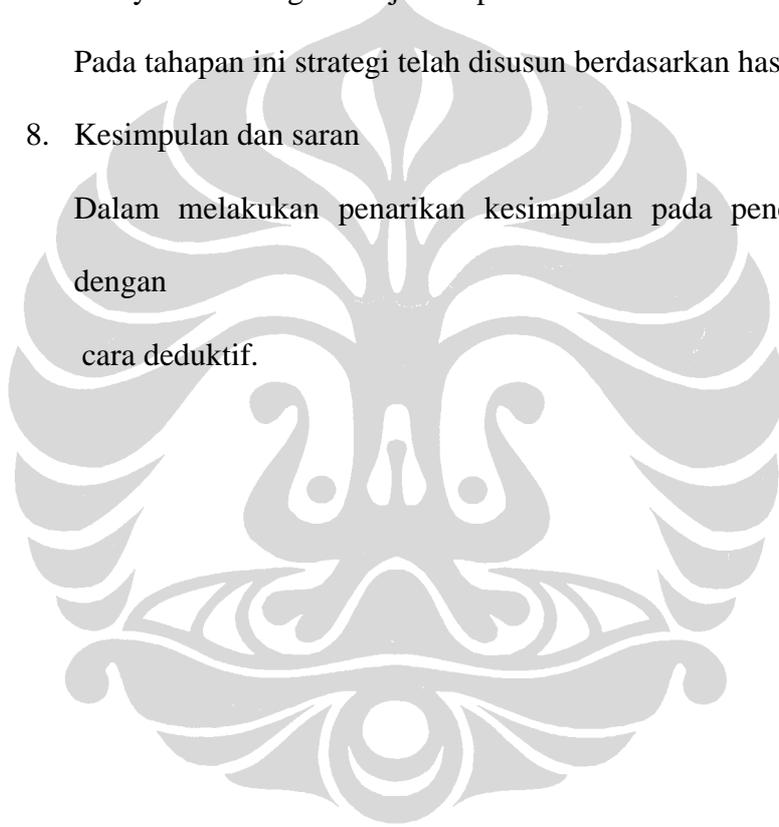
Dari hasil perumusan strategi manajemen perubahan maka selanjutnya akan ditentukan prioritas dari strategi yang dihasilkan. Dalam menentukan skala prioritas digunakan *Analytic Hierarchy Process*.

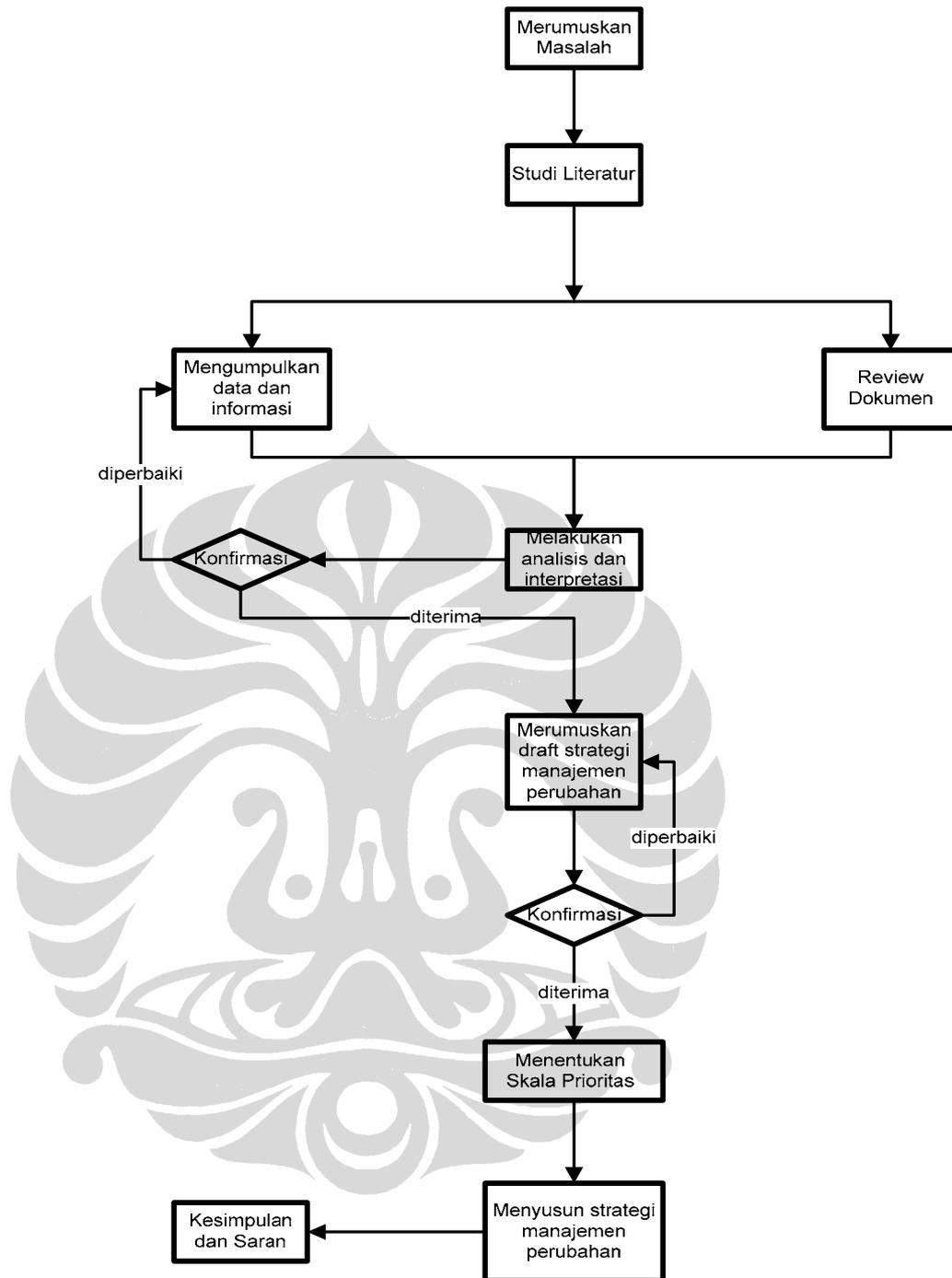
7. Menyusun strategi manajemen perubahan

Pada tahapan ini strategi telah disusun berdasarkan hasil dari tahap ke-6.

8. Kesimpulan dan saran

Dalam melakukan penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif.

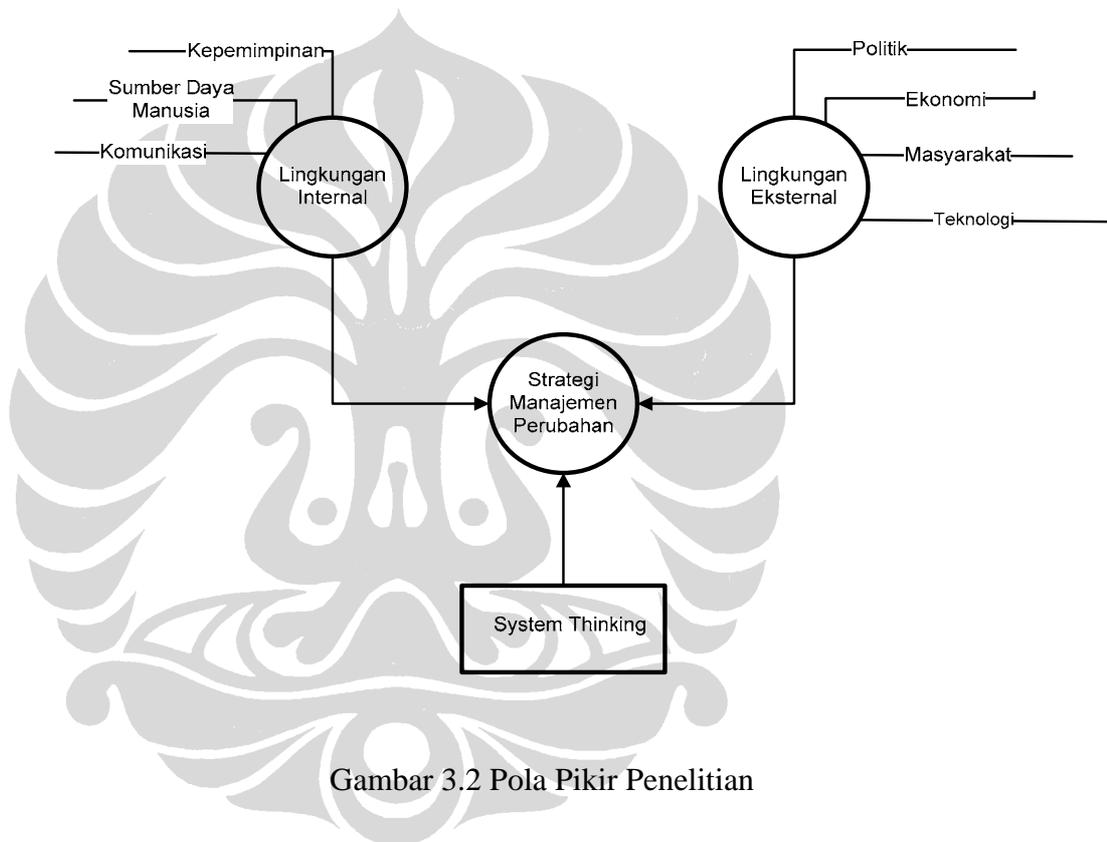




Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

3.2 POLA PIKIR

Pola pikir merupakan keterkaitan antara teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini pola pikir yang digunakan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Pola Pikir Penelitian

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan beberapa hal yang mempengaruhi dalam menentukan strategi manajemen perubahan yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal dan pendekatan *system thinking*.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai pejabat eselon III pada unit yang terkait dengan penggunaan TIK dan unit yang mengelola TIK. Data yang diperoleh dengan cara ini merupakan data primer yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Dokumen

Data yang diperoleh dari dokumen merupakan data pendukung (data sekunder) yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen berupa gambaran organisasi dan kebijakan organisasi yaitu Renstra BPN RI, SOPP BPN RI, Peraturan Kepala BPN RI No 3/2006, Grand Desain TIK BPN RI dan Buku LOC IIB.

3. Pengamatan

Selain dengan cara wawancara maka data primer diperoleh juga dengan pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk melihat proses kerja pada pelayanan pertanahan untuk melengkapi informasi yang berhasil diperoleh melalui wawancara.

3.4 ANALISIS

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data. Analisis yang dilakukan adalah analisis SWOT TI. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap empat aspek dari organisasi yaitu: **Strength** (Kekuatan), **Weakness** (Kelemahan), **Opportunities** (Peluang) dan **Threats** (Ancaman). Analisis ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman), sehingga akan diperoleh strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

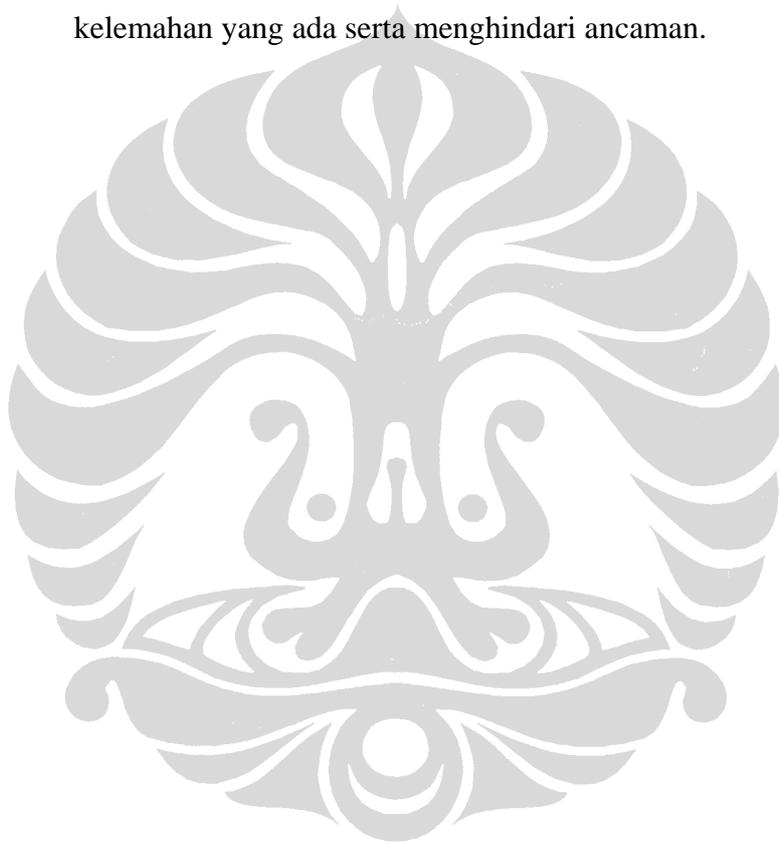
Untuk memperoleh strategi yang menyesuaikan bagaimana kekuatan dan peluang menghadapi kelemahan dan ancaman maka strategi dipetakan kedalam matrik SWOT yang akan memberikan empat set kemungkinan alternatif strategi manajemen perubahan yang digambarkan dalam matrik SWOT berikut :

	Opportunities	Threats
Strength	S-O Strategies	S-T Strategies
Weakness	W-O Strategies	W-T Strategies

Tabel 3.1 Matrik SWOT

- S-O strategies: Strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- W- O strategies: Strategi yang memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- S-T strategies: Strategi yang memanfaatkan kekuatan sebesar-besarnya untuk mengatasi ancaman yang dihadapi organisasi.
- W-T strategies: Strategi yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.



BAB IV

PROFIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan yang dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Agraria* dipimpin oleh Kepala BPN. Dan peraturan yang mengatur tentang BPN RI adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.

4.1 SEMBOYAN, VISI DAN MISI

Semboyan BPN-RI adalah :

“Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat.”

Visi BPN-RI adalah :

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.”

Misi BPN-RI adalah :

“Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
- Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat;
- Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

4.2 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang ada, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2007-2009 yang merupakan wadah harmonisasi perencanaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah di bidang pertanahan pasca penataan kembali organisasi BPN-RI secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan berbagai sektor dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BPN-RI 2007-2009 tersebut, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (*Prosperity*).
- Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (*Equity*).
- Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (*Social Welfare*).
- Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*Sustainability*).

Agar tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada BPN-RI dapat diwujudkan dan Agenda Kebijakan dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yang diinginkan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

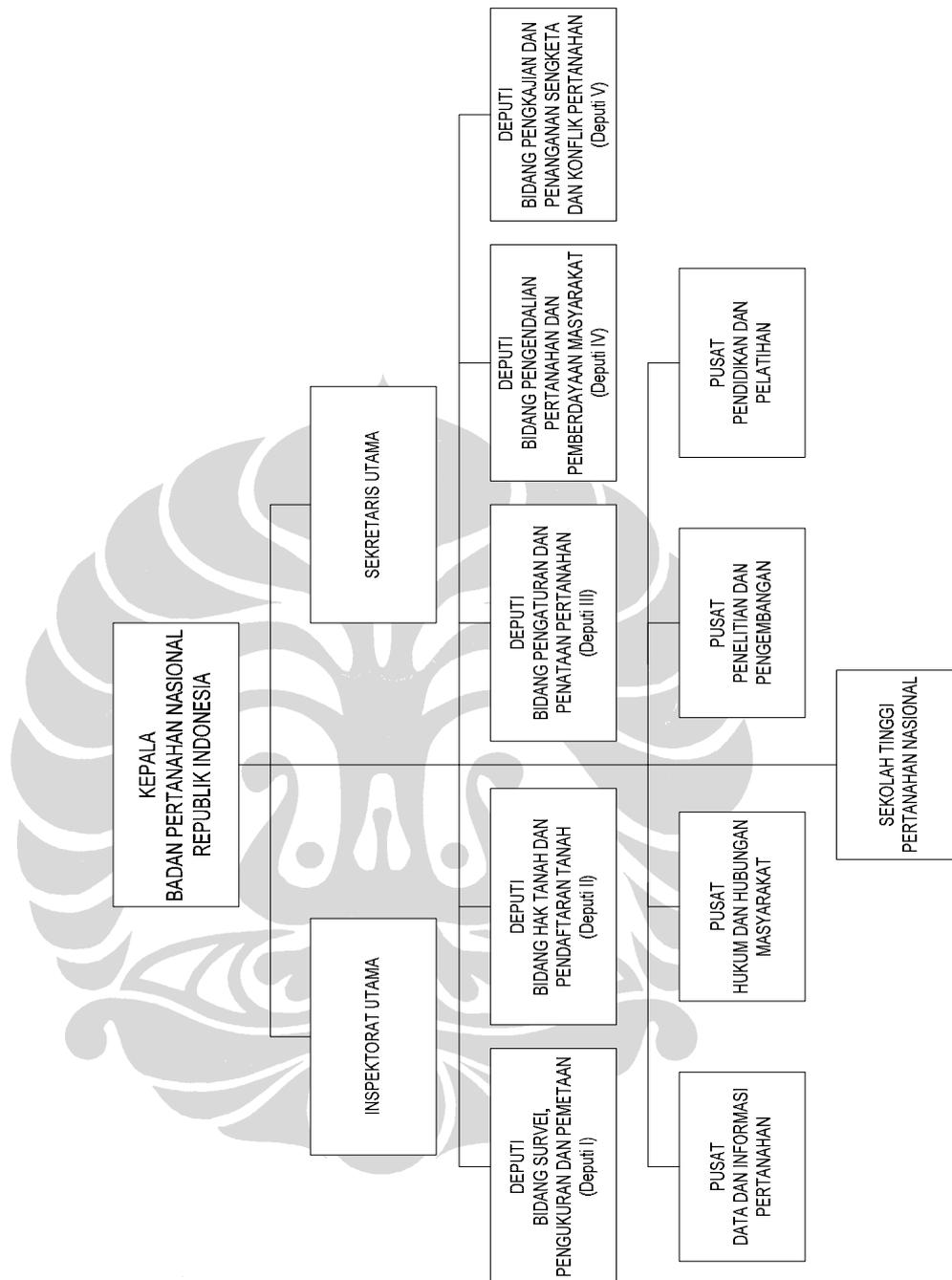
1. Memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pertanahan di semua unit kerja BPN-RI melalui Program Pengelolaan Pertanahan;
2. Menata keseimbangan P4T dan mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja dengan mempersiapkan dan menyelenggarakan Program Pembaruan Agraria Nasional;
3. Meningkatkan Program Penguatan Hak atas Tanah Rakyat melalui akselerasi program PRONA(Program Nasional Agraria) dan adjudikasi;
4. Mengembangkan Pengelolaan dan Kebijakan Pertanahan serta melakukan percepatan pendaftaran hak atas tanah;
5. Menguatkan daya dukung (kapasitas) aparatur pertanahan melalui program peningkatan sumberdaya aparatur dan pendidikan kedinasan;
6. Menguatkan daya dukung sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanahan melalui program peningkatan sarana, prasarana serta infrastruktur;
7. Memantapkan Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS);
8. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

4.3 STRUKTUR ORGANISASI

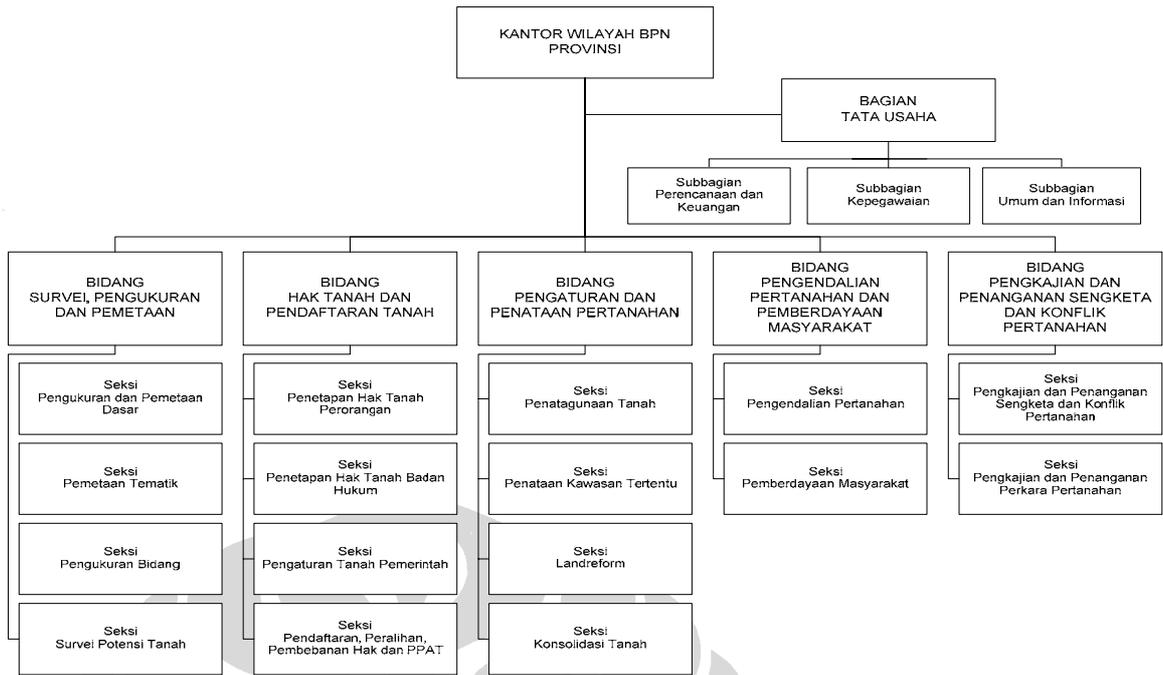
Struktur organisasi BPN RI pada gambar 4.1 ditetapkan pada Perpres 10/2006. Struktur ini merupakan struktur organisasi BPN RI Pusat sedangkan untuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang menjadi ujung tombak pelayanan pertanahan di BPN RI memiliki struktur organisasi seperti gambar 4.2 dan gambar 4.3.

Dalam struktur organisasi BPN Pusat dapat kita lihat bahwa BPN RI memiliki lima deputi yang terkait dengan tugas pokok BPN di bidang pertanahan dan kelima deputi bertanggung jawab langsung ke KaBPN. Selain itu terdapat Inspektorat Utama (Irtama), Sekretariat Utama (Settama), Pusat Data dan Informasi Pertanahan (Pusdatin) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat (Puskumhumas) serta Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN).

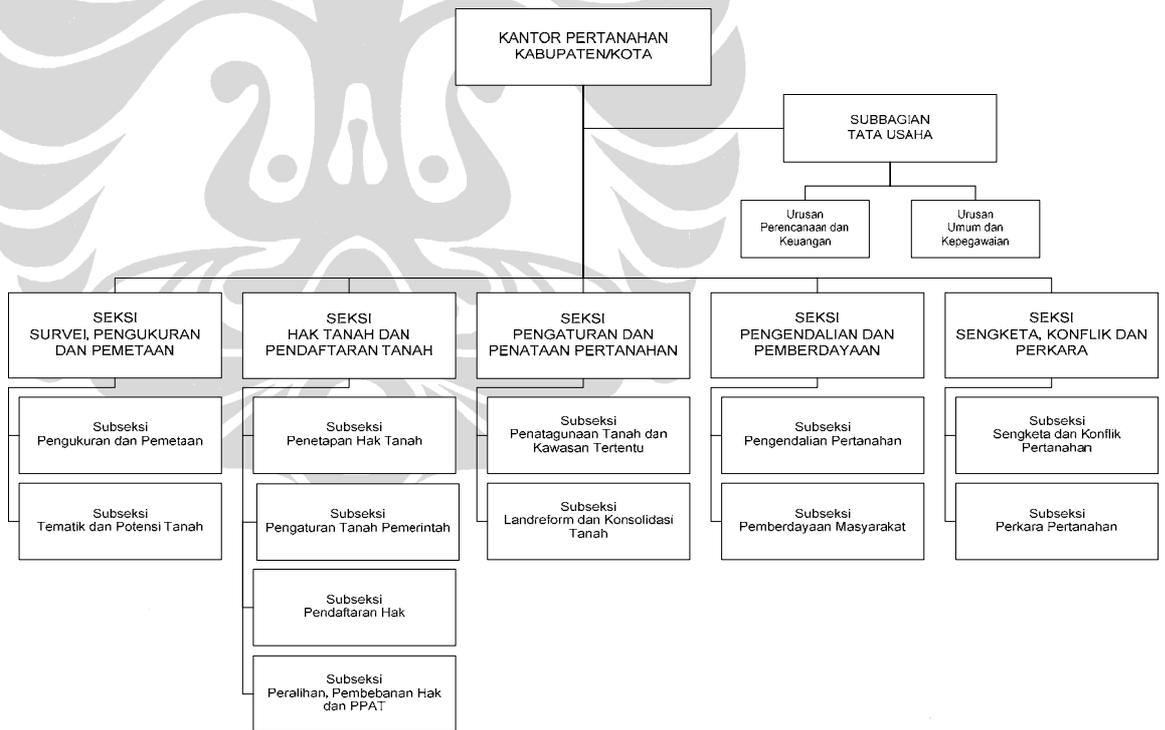
Pusdatin sebagai unit TI berada langsung di bawah KaBPN tetapi dalam operasional unit ini berkoordinasi dengan Settama sebagai unit yang mengkoordinasi Pusat-pusat. Dari struktur organisasi Kanwil dan Kantah dapat dilihat bahwa semua deputi yang ada di kantor pusat terwakili baik di Kanwil maupun Kantah hal ini untuk mempermudah koordinasi masing-masing bidang dengan kantor pusat. Akan tetapi Pusdatin sebagai unit pengelola TIK di BPN RI tidak terwakili dalam struktur organisasi Kantah. Saat ini tanggung jawab pengelolaan TIK di Kantah dilaksanakan oleh seorang administrator.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat BPN RI



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan

4.4 TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola pertanahan BPN RI memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut (Peraturan Kepala BPN RI No 3/2006):

1. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
3. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
4. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
5. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
6. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
7. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
8. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
9. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
10. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
11. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
12. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
13. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

14. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
15. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
16. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
17. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
18. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
19. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
20. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
21. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

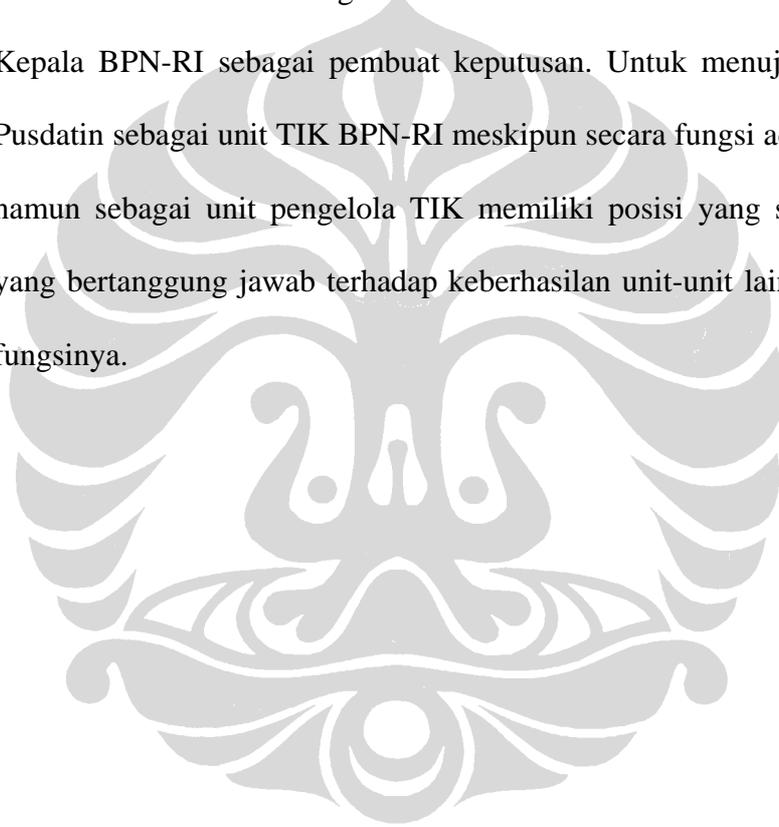
Dari tugas dan fungsi di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas BPN RI adalah pengelolaan data dan informasi pertanahan. Jelas tugas tersebut sangat membutuhkan dukungan TIK.

4.5 PROSES BISNIS

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa fungsi utama BPN-RI terbagi dalam dua fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu perumusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Deputi I, Deputi II, Deputi III, Deputi IV, dan Deputi V. Fungsi kedua yaitu

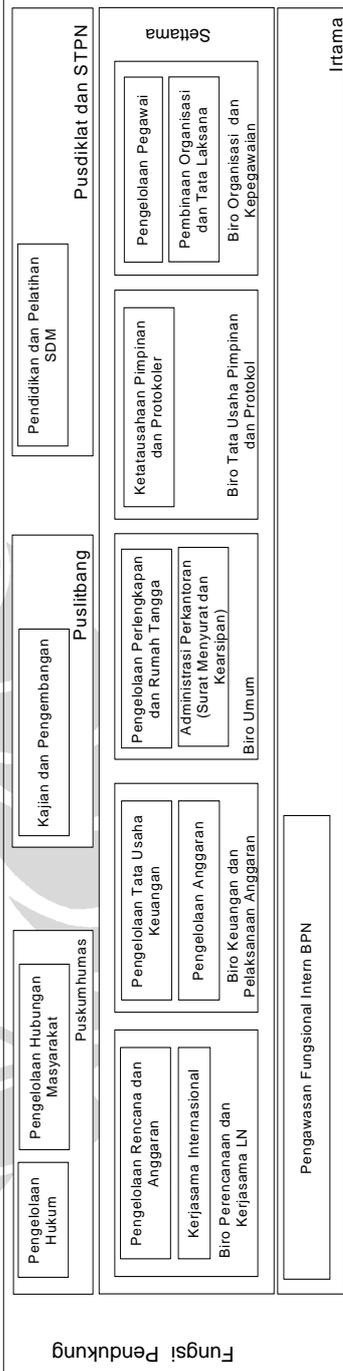
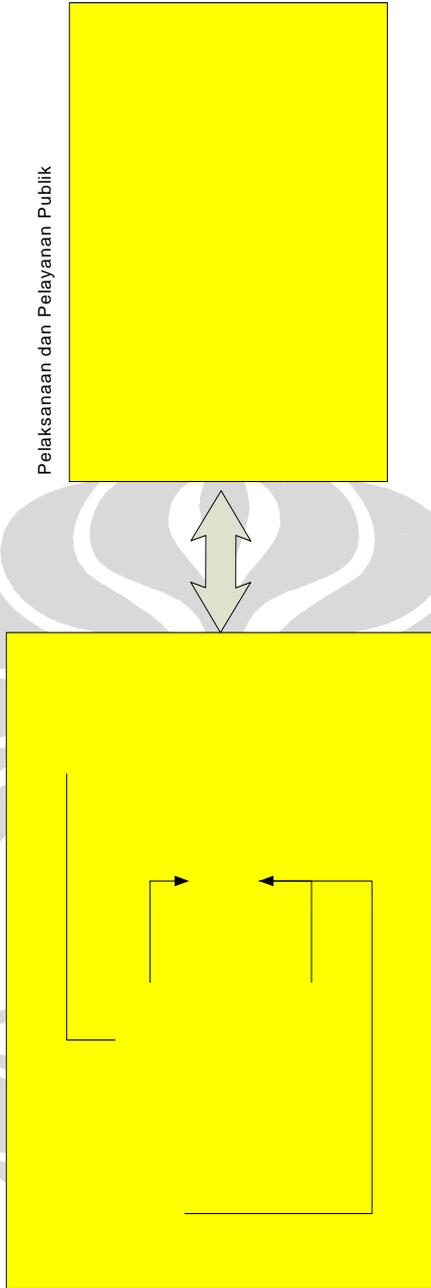
pelaksanaan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kanwil dan Kantah. Dimana Kanwil dan Kantah merupakan perpanjangan tangan dari fungsi-fungsi Deputi I, II, III, IV, dan V yang merupakan ujung tombak pelayanan BPN-RI untuk masyarakat.

Sementara itu fungsi pendukung dilaksanakan oleh Settama, Irtama, Pusdatin, Puskumhumas dan Puslitbang. Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa semua fungsi tersebut dalam koordinasi dan bermuara kepada Kepala BPN-RI sebagai pembuat keputusan. Untuk menuju BPN yang *digital*, Pusdatin sebagai unit TIK BPN-RI meskipun secara fungsi adalah unit pendukung namun sebagai unit pengelola TIK memiliki posisi yang strategis sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan unit-unit lain dalam menjalankan fungsinya.



Pembuat Keputusan (Decision Maker)
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Perumusan, perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan



Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pusdatin

Gambar 4.4 Alur Proses Bisnis BPN RI.

4.6 KONDISI SI/TI SAAT INI

Dalam membahas kondisi SI/TI di BPN RI ada 4 hal yang dibahas yaitu sumber daya manusia, portofolio aplikasi, manajemen TIK dan sistem informasi Komputerisasi Kantor Pertanahan. Pembahasan ini bertujuan untuk lebih memahami kondisi SI/TI di BPN RI.

4.6.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian yang penting dalam sebuah organisasi. Dalam hal sumber daya manusia (SDM) ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi terkait dengan kompetensi yang dimiliki SDM berdasarkan:

- a. Pendidikan formal
- b. Pendidikan non-formal (kursus, training), dan sertifikasi terkait
- c. Pengalaman kerja, termasuk penguasaan terhadap teknologi informasi tertentu.
- d. Latar belakang individu: inisial nama, usia, jabatan,
- e. dan lain sebagainya.

Kondisi SDM dan Organisasi TI yang ada saat ini dapat diterangkan sebagai berikut :

1. SDM TI di lingkungan BPN, belum terdaftar seluruhnya oleh Pusdatin
2. Untuk pelatihan komputer terutama yang berhubungan dengan SIMTANAS dan pembinaan SDM TI oleh Pusdatin telah berjalan namun belum optimal mengingat masih kurangnya tenaga di Pusdatin sendiri
3. Pelatihan untuk peningkatan kemampuan SDM TI di Pusdatin masih bersifat *ad hoc* belum merupakan hasil suatu perencanaan jangka panjang yang menunjang rencana strategis BPN dan berkelanjutan untuk menunjang karir mereka
4. Penyebaran SDM TI di unit-unit kerja yang belum merata, sehingga terdapat kesenjangan kemampuan TI. Hal ini menyebabkan pengelolaan TI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan TI di unit-unit kerja BPN tidak dapat berjalan secara optimal.
5. Belum adanya *carrier path* yang jelas di lingkungan BPN bagi SDM TI
6. Pengelolaan TI di Kanwil BPN masih sangat minimal, sehingga pengelolaan TI untuk Kantah masih langsung ditangani oleh Pusdatin. Hal ini menambah semakin tidak optimalnya pemanfaatan TI di lingkungan BPN
7. Kemampuan SDM TI sebagian besar berasal dari otodidak (belajar sendiri dan karena hobi).

4.6.2 Portofolio Aplikasi

Secara umum aplikasi yang ada saat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu aplikasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pertanahan yang merupakan *core business* BPN-RI (selanjutnya disebut aplikasi pertanahan) dan aplikasi non-pengelolaan pertanahan yaitu aplikasi yang bersifat mendukung *core business* BPN-RI (selanjutnya disebut aplikasi non-pertanahan). Umumnya kelompok aplikasi pengelolaan pertanahan adalah aplikasi yang dipakai untuk operasional unit kerja deputy, sedangkan kelompok aplikasi non-pengelolaan pertanahan adalah aplikasi yang dipakai untuk operasional unit kerja selain unit kerja Deputy.

Kelompok Aplikasi Pertanahan

- 1) *Land Office Computerization (LOC)* atau Komputerisasi Kantor Pertanahan
- 2) Sistem Informasi Konsolidasi Tanah (SIKONTAN)
- 3) Aplikasi Pemetaan

Kelompok Aplikasi Non-Pertanahan

- 1) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- 2) Sistem RKKAL
- 3) Sistem Surat Perintah Membayar
- 4) Sistem Monitoring Perjalanan Dinas
- 5) Sistem Akuntansi Instansi
- 6) Situs BPN

4.6.3 Manajemen TIK

Dalam melakukan manajemen TIK, Pusdatin sebagai unit pengelola TIK memiliki tanggung jawab yang besar yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan nasional (SIMTANAS) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdatin. Struktur organisasi Pusdatin terdiri dari :

1. Kepala Pusdatin
2. Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan

Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi pertanahan dan pengembangan e-government di lingkungan BPN.

Bidang ini terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sistem dan Standar Aplikasi

Subbidang Sistem dan Standar Aplikasi mempunyai tugas melakukan analisa dan penyusunan sistem, standar aplikasi, data dan informasi pertanahan.

- b. Sub Bidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi.

Subbidang Penerapan Jaringan dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, penerapan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi sistem jaringan dan aplikasi.

3. Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS

Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS mempunyai tugas melakukan bimbingan komputerisasi dan penerapan model komputerisasi, publikasi, pelayanan data dan informasi pertanahan

a. Sub Bidang Pelayanan Data dan SIMTANAS

Subbidang Pelayanan Data dan SIMTANAS mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, validasi, pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pertanahan, pengembangan sistem informasi eksekutif, pengembangan e-government serta penerapan dan pemeliharaan SIMTANAS.

b. Sub Bidang Bimbimngan Komputerisasi

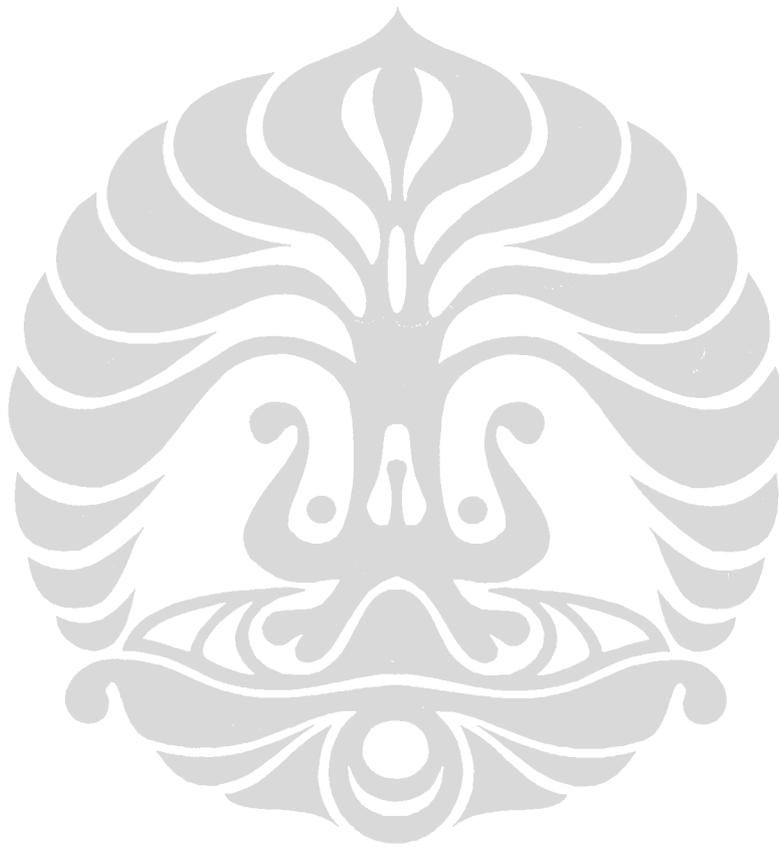
Subbidang Bimbingan Komputerisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian pembinaan teknis dan pemeliharaan komputerisasi.

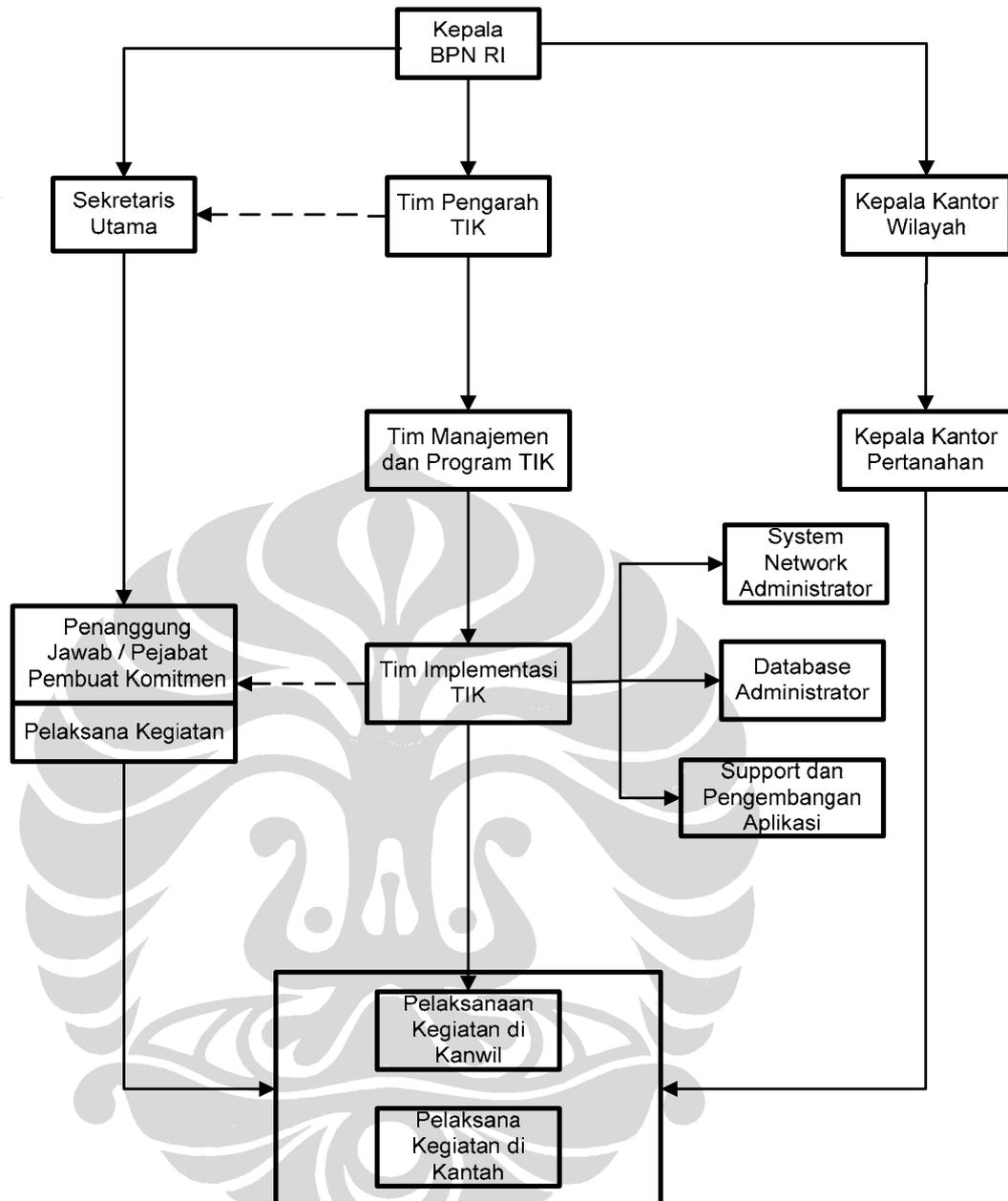
4. Sub Bidang Tata Usaha

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur ini adalah struktur Pusdatin di Kantor Pusat sedangkan untuk Kanwil dan Kantah tidak ada unit TIK yang menjadi wakil Pusdatin untuk menjalankan tugasnya. Yang ada hanya administrator teknis yang mengelola TIK di Kanwil dan Kantah. Saat ini dalam pengelolaan TIK telah dibentuk suatu Tim Pengelola TIK BPN RI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI No. 211-IV-2008 tanggal 4 Juni 2008. Tim ini bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembinaan, pembuatan, pengembangan sistem, data, statistik dan informasi. Tim

ini dibentuk dalam rangka untuk menghindari pemanfaatan TIK yang tidak terkoordinasi dengan baik. Karena dalam implementasi selama ini banyak implementasi yang tumpang tindih dan tidak semua implementasi dapat diketahui dengan baik oleh Pusdatin. Tentunya ini akan mempersulit jika akan melakukan integrasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Tim Pengelola TIK dalam melakukan tugasnya memiliki struktur sebagai berikut :





Gambar 4.5 Struktur Tim Pengelola TIK BPN RI

4.6.4 Sistem Informasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

Saat ini di lingkungan BPN-RI telah terpasang Sistem *Land Office Computerization* (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan yaitu Sistem Pelayanan Pertanahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terpadu dan komprehensif, bertujuan untuk :

- Integrasi Informasi pertanahan (Yuridis dan Fisik)
- Monitoring proses dan *Early Warning System* (Intern dan Ekstern)
- Pelaporan dan penyediaan informasi pertanahan nasional dalam bentuk *Executive Information System*
- Pelayanan informasi pertanahan 24 jam melalui WEB dan SMS
- Pelayanan pertanahan yang lebih mendekati masyarakat , sebagai model adalah di Kantah Karanganyar, yaitu Larasita yang merupakan perluasan dari produk LOC yang dikembangkan oleh Pusdatin BPN-RI
- Membangun *database* pertanahan nasional dan peningkatan kualitas informasi pertanahan
- Pembangunan komunikasi *online* nasional - Kantor Pusat, Kanwil dan Kantah

- **Kondisi Komputerisasi Kantor Pertanahan Saat Ini**

Pengelolaan Sistem KKP berada dalam wewenang dan tanggung jawab Pusdatin BPN-RI dengan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Spanyol. Konsep KKP pada dasarnya mengadopsi konsep *enterprise resources planning* (ERP) yang berusaha melakukan komputerisasi perkantoran mulai dari *front office* sampai *back office* yang dikembangkan dan diterapkan secara bertahap mulai tahun 1997.

Sistem KKP saat ini telah terpasang di 80 Kantah, dimana dari 80 Kantah tersebut belum semua kantah menggunakannya secara optimal. Salah satu Kantah yang mengembangkan KKP secara swakelola menjadi sistem yang secara langsung melakukan pelayanan eksternal (masyarakat) adalah Kantah Karanganyar. Dimana KKP dikembangkan menjadi aplikasi yang dikenal dengan nama Larasita. Larasita dapat berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kondisi ini dapat menjadi langkah awal bagi penerapan Sistem Informasi Pertanahan dan *e-government* di lingkungan BPN.

Sampai saat ini KKP telah memasuki pengembangan di fase ke-3, dimana pada fase ke-1 disebut dengan LOC 1 yang dibangun tahun 1997, fase ke-2 disebut dengan LOC 2A yang dibangun tahun 2001 dan fase ke-3 disebut dengan LOC 2B yang dibangun tahun 2003. Data penggunaan LOC 1, LOC 2A dan LOC 2B dapat dilihat pada tabel 4.1.

- **Tantangan Dalam Implementasi KKP**

Dalam mengimplementasikan KKP terdapat beberapa tantangan yang muncul. Tantangan ini menghambat dalam pemanfaatan KKP, sehingga hasilnya menjadi tidak optimal. Berikut ini adalah tantangan-tantangan tersebut :

1. Kualitas Data

Kualitas data pertanahan yang akurat harus menjadi prioritas BPN RI.

Akan tetapi hal tersebut sulit untuk terwujud karena ada beberapa sebab yaitu :

- Sumber Data Tidak Lengkap
- Data Tidak Standar
- Data Ganda
- Data digital tidak dipelihara sehingga dalam waktu singkat data menjadi usang(*out of date*)

2. Sumber Daya Manusia

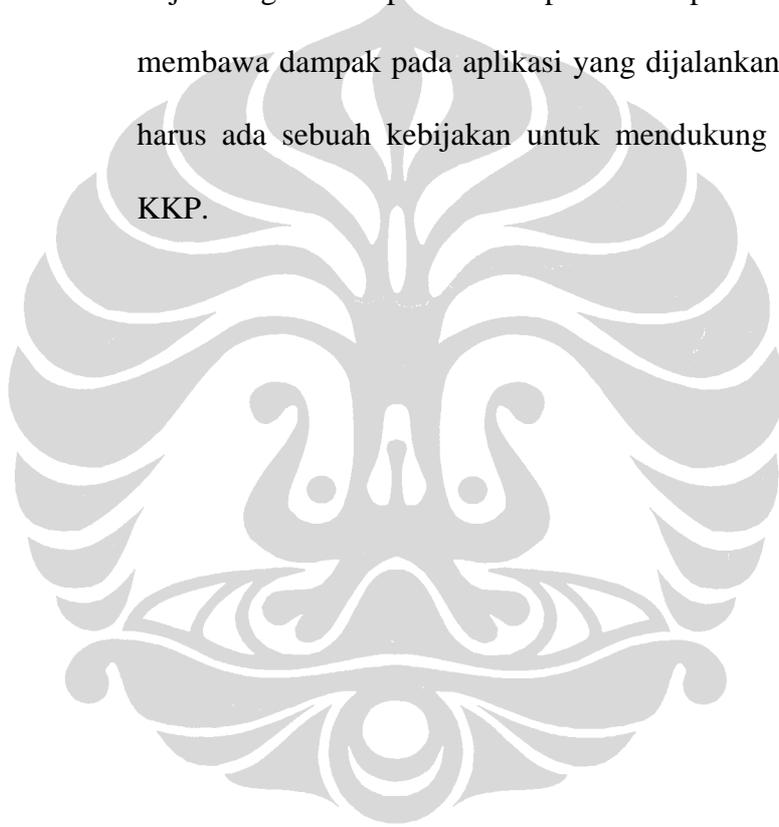
- Adanya mobilitas yang tinggi dari SDM, jika SDM yang sudah menguasai TIK dipindahkan maka pengganti belum tentu orang yang memiliki pengetahuan yang sama sehingga diperlukan waktu lagi untuk pelatihan.
- Kemampuan administrator sistem yang tidak merata, ada yang memiliki kemampuan yang sangat baik sampai yang tidak memiliki persiapan minimum yang dibutuhkan administrator.
- Pendapatan yang rendah untuk tenaga TIK di Pemerintahan.

3. Organisasi

- Dukungan pimpinan, hal ini terlihat belum tercapainya pemahaman yang sama mengenai pengelolaan data pertanahan dengan menggunakan TIK (*e-leadership*).

4. Bisnis Model

Sejak tahun 1997 saat pertama kali kegiatan KKP dilakukan telah terjadi tiga kali perubahan peraturan pertanahan. Perubahan ini membawa dampak pada aplikasi yang dijalankan di Kantah. Sehingga harus ada sebuah kebijakan untuk mendukung penyesuaian aplikasi KKP.



Tabel 4.1 Daftar Penggunaan KKP di Kanwil dan Kantah

Kegiatan	LOC 1 (1997)		LOC 2A (2001)		LOC 2B (2003)		
	Kanwil	Kantah	Kanwil	Kantah	Kanwil	Kantah	
						LOC	SAS
Lokasi (25 Kanwil dan 76 Kantah)							
• Sumatera	2	3	4	5	1	-	1
• Jawa	5	8	-	17	1	3	22
• Kalimantan	-	-	1	2	3	2	
• Sulawesi	1	1	-	-	4	1	-
• Bali	-	-	1	1	-	-	8
• NTT	-	-	1	1	-	-	-
• NTB	-	-	-	-	1	1	-
Jumlah	8	12	7	26	10	7	31
Data Pertanahan	Buku Tanah = 9,5 juta, Peta Digital = 652.675 ha						
Digitalisasi Buku Tanah	1,59 juta bidang		4,4 juta bidang		3,41 juta bidang		
Digitalisasi dan Integrasi Peta	1.500 ha		37.500 ha		523.675 ha		
Software Aplikasi :							
• Tekstual	22		36		85		
• Spasial	4		6		12		
• Kombinasi	-		42		122		